



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan penataan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70).
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
13. Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap bulan.
14. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

15. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah seluruh unsur dalam Pemerintah Provinsi Banten.
16. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disingkat SIMRAL ialah aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
TARGETSAKIP  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 2

Bappeda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah berbasis Kinerja.

Pasal 3

Bappeda wajib menagih serta mensyaratkan seluruh Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk perjanjian kinerja atau paling sedikit capaian kinerja *output* yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

Pasal 4

Bappeda wajib memastikan seluruh Perangkat Daerah untuk merumuskan Kinerja Utama (indikator dan target) dengan penganggarnya.

Pasal 5

Bappeda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 6

- (1) Bappeda wajib menginventarisasi keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.
- (2) Bappeda wajib menginventarisasi perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode RPJMD.

## Pasal 7

Dalam hal merencanakan, mengukur dan mengevaluasi target kinerja, Bappeda menggunakan SIMRAL untuk Perangkat Daerah.

## Pasal 8

Bappeda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinasikan agar nilai komponen perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

## Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah wajib secara langsung memantau dan mengoordinasikan serta memastikan bahwa perencanaan Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah berbasis kinerja.

## Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah wajib mereviu dan menyempurnakan Renstra di Perangkat Daerah dan memastikan keselarasannya dengan RPJMD.

## Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Rencana Aksi diawal tahun, menyusun Laporan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Berjalan diakhir tahun, dan menyusun Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan diakhir tahun dan melaporkan kepada Bappeda, Inspektorat Daerah serta Sekretaris Daerah melalui SIMRAL.

## Bagian Kedua

### Pengukuran Kinerja

## Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada Kinerja atau Hasil.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari Gubernur, Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staff serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.

- (3) Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib memastikan Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat sebagai berikut:
  - a. terukur;
  - b. relevan;
  - c. dapat ditagih; dan
  - d. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.
- (4) Sekretaris Daerah melalui Bappeda menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga tingkatan paling bawah sesuai dengan RPJMD sebagai berikut:
  - a. Indikator Tujuan untuk Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Staf Ahli Gubernur;
  - b. Indikator Sasaran untuk Kepala Dinas/Badan/Biro;
  - c. Indikator Program untuk Kepala Bidang/Bagian/UPT/Cabang Dinas/Balai/Kantor; dan
  - d. Indikator Output untuk Kepala Seksi/Sub. Bagian/Sub. Bidang.
- (5) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian integrasi yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Indikator kinerja yang digunakan pada tingkatan yang sama, maka besaran pembobotan target disesuaikan dengan *output* yang dihasilkan yang berdampak langsung terhadap indikator kinerja di atasnya.
- (7) Penjabaran Pendistribusian hubungan indikator kinerja dijabarkan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang tertuang dalam SIMRAL.

### Pasal 14

Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib memberikan penghargaan dan pengakuan (*reward dan recognition*) atas capaian kinerja kepada:

- a. Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi (mencapai kinerja utama);
- b. Eselon III berkinerja tinggi; dan
- c. Eselon IV berkinerja tinggi.

## Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah wajib dalam memastikan bahwa indikator-indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja saling berkaitan, berjenjang, dan sesuai dengan tugas dan fungsi serta syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

## Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan pembobotan target kinerja dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah serta melakukan monitoring, mengukur, mengevaluasi, dan menyimpulkan capaian kinerja sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

## Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan pengawasan berjenjang terhadap capaian kinerja telah berjalan dengan efektif.

## Pasal 18

Seluruh Perangkat Daerah agar membudayakan pemberian penghargaan (*reward*) atau pengakuan (*recognition*) kepada seluruh entitas yang berada pada Perangkat Daerah tersebut berdasarkan pencapaian kerjanya, bukan hanya pada tingkat kehadiran.

## Pasal 19

Kepala Perangkat Daerah berkala mengawasi capaian kinerja pada level Eselon III dan IV serta melaporkan Laporan Pengukuran Kinerja Tiap Bulan, Triwulan, Semester dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda.

## Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja Pasal 20

(1) Inspektorat Daerah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah wajib memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan progress tersebut dalam sebuah laporan dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 21

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi internal pada Perangkat Daerah masing-masing terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.

#### Bagian Keempat Pelaporan Kinerja Pasal 22

Sekretaris Daerah melalui Bappeda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, mengoordinasikan agar Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

#### Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja hingga ke Eselon IV dalam setiap bulan kepada Sekretaris Daerah melalui Bappeda.

#### Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya.

#### Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi sekurang-kurangnya pada level *output*.

## Pasal 26

Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya menyajikan Informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

## Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dan memuat perbandingan sebagai berikut:

- a. realisasi tahun ini dengan Realisasi tahun sebelumnya;
- b. target versus Realisasi;
- c. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Target Jangka Menengah;
- d. realisasi sampai dengan tahun berjalan versus Standar Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
- e. realisasi atau capaian organisasi/Instansi dibanding dengan Realisasi atau capaian organisasi/Instansi sejenis yang setara atau sekelas.

## Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah dapat diandalkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi terkait data-data target realisasi dalam Laporan Kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. valid;
  - b. dapat ditelusuri ke sumber data;
  - c. diperoleh dari sumber yang kompeten;
  - d. dapat diverifikasi; dan
  - e. konsisten.

## Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi didalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan program dan anggaran berikutnya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi didalam Laporan Kinerja digunakan untuk Peningkatan Kinerja.

- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa Informasi didalam Laporan Kinerja digunakan untuk Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 4 Oktober 2018  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 4 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
 NOMOR 42 TAHUN 2018  
 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS  
 KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 PROVINSI BANTEN

A. PENDISTRIBUSIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator tujuan ialah indikator makro pada RPJMD yang dibebankan menjadi indikator kinerja Sekertaris Daerah, Asisten Daerah dan Staf Ahli yang terdiri dari :

Tabel A.1 Indikator Makro / Tujuan

No	Indikator Tujuan	Penanggung Jawab	
1.	LPE	Sekertaris Daerah	1. Asisten Pembangunan Dan Perekonomian 2. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
2.	Inflasi		1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
3.	Pengangguran		1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
4.	Kemiskinan		1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan 3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5.	IPM		1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> <li>4. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum</li> </ul>
6.	Angka Harapan Hidup		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> </ul>
7.	Capaian kinerja infrastruktur daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pembangunan Dan Perekonomian</li> <li>2. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan</li> </ul>
8.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Asisten Pembangunan Dan Perekonomian</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum</li> <li>4. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum</li> <li>5. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan</li> <li>6. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia</li> </ul>

Indikator Tujuan diturunkan menjadi indikator sasaran pada RPJMD yang menjadi indikator kinerja Kepala Dinas/Badan/Biro yang kemudian diturunkan menjadi Indikator Program yang menjadi Indikator Kinerja Kepala Bidang/Bagian/UPT/Cabang Dinas/Balai/Kantor dan diturunkan kembali menjadi Indikator Kegiatan/Output yang menjadi Indikator Kinerja Kepala Seksi / Sub. Bagian / Sub. Bidang/ TU.

Pembagian kelompok Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Output/Kegiatan sebagai berikut yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel A.2 PEMBAGIAN KELOMPOK INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN OUTPUT/KEGIATAN

Sekertaris Daerah			Indikator Tujuan
Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	
Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dan Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum			
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian	Asisten Administrasi Umum	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Pemerintahan</li> <li>2. Biro Hukum</li> <li>3. Biro Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>5. Dinas Pemuda dan Olah Raga</li> <li>6. DP3AKB</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>8. Dinas Kesehatan</li> <li>9. RSUD Banten</li> <li>10. RSUD Malingping</li> <li>11. Dinas Sosial</li> <li>12. Satpol PP</li> <li>13. Badan Penanggulangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perekonomian</li> <li>2. Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>3. Biro Bina Infrastruktur</li> <li>4. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu</li> <li>5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</li> <li>7. Dinas Pariwisata</li> <li>8. Dinas Pertanian</li> <li>9. Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>10. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>13. Badan Pendapatan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Umum</li> <li>2. Biro Administasi Rumah Tangga Pimpinan</li> <li>3. Biro Organisasi</li> <li>4. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah</li> <li>6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</li> <li>7. Badan Penghubung</li> <li>8. Inspektorat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Indikator Sasaran (Kepala Dinas / Badan /Biro)</li> <li>(b) Indikator Program (Kepala Bidang / Bagian /UPT /Balai/Kantor/ Direktur/ Cabang Dinas)</li> <li>(c) Indikator Kegiatan / Output (Kepala Seksi / Sub. Bagian / Sub. Bidang / TU)</li> </ol>

<p>Bencana Daerah 14. Kesbangpol 15. Sekertariat Dewan</p>	<p>14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 18. Dinas Perhubungan 19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>		
--	---	--	--

Tabel A.3 Pembagian Indikator Kinerja Kelompok I

KELOMPOK I																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyele nggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Biro Pemerintahan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Kabag. Kerjasama	1	Tata Usaha Pemerintahan	Kasubag Tata Usaha
										2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	1	Persentase keselarasaan kebijakan di bidang Pemerintahan	1	Kabag. Kerjasama	1	Penyelenggaraa n Kerjasama Daerah	Kasubag Kerjasama Daerah
										2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	2	Persentase keselarasaan kebijakan di bidang Pemerintahan	2	Penyelenggaraa n Kerjasama Luar Negeri	Kasubag Kerjasama Luar Negeri		
										2	Kabag. Administrasi Kewilayaha n	1	Pembinaan Kabupaten/Kot a Dalam Penyelenggaraa n Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kasubag Administrasi Bina Kecamatan				
										2	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Kasubag Batas Daerah						

KELOMPOK I														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
									3	Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Kasubag Administrasi Rupabumi			
									3	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Penataan Daerah Otonom	Kasubag Penataan Daerah	
											2	Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga	Kasubag Administrasi Pemerintahan	
											3	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Kasubag Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
					Kepala Biro Hukum	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Kabag. Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum	1	Tata Usaha Biro Hukum	KaSubag. Umum & Kepeg/ Subag TU

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
						2 Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	1 Prosentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasioanal	1 Kabag. Sosialilasi dan Dokumentasi Produk Hukum	1 Sosialisasi Hukum	Kasubag Sosialisasi Hukum	
									2 Kabag. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	2 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi Hukum
										1 Penanganan Sengketa Hukum	Kasubag Sengketa Hukum
								2 Pelayanan Bantuan Hukum		Kasubag Bantuan Hukum	
								1 Kabag. Peraturan Perundang-Undangan	3 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM	Kasubag Hak Asasi Manusia	
									2 Persentase realisasi target prolegda	1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah
							3 Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah		2 Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	Kasubag Rancangan Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah	

KELOMPOK I											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
							akademik		3	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Kasubag Evaluasi Dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
					KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Tata Usaha Biro Kesra	Sub Bag TU

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						2 Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra	1 Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga	1 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Kasubag Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
									2 Perumusan Kebijakan Kesehatan	Kasubag Perumusan Kebijakan Kesehatan
									3 Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil	Kasubag Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil

KELOMPOK I												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
								2	Bagian Sosial dan Agama	1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama	Kasubag Perumusan Kebijakan Kehidupan Agama
										2	Koordinas Lembaga Agama	Kasubag Perumusan Kebijakan Lembaga Agama
										3	Perumusan Kebijakan Sosial	Kasubag Perumusan Kebijakan Sosial
								3	Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat	1	Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kasubag Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KELOMPOK I											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
									2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kasubag Perumusan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
									2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
									1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Kasubag Keuangan
									1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	

KELOMPOK I										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
									3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
								4 Peningkatan Kapasitas Aparatur		
								5 Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah		
								6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		
								2 Kepala Balai, Kepala UPT Taman Budaya, Kepala UPT Meseum Kepala Kantor Cabang	1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kaubag Tata Usaha
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		
								Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		

KELOMPOK I															
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
								Dinas	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah						
Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	IPM	1	Sekertaris Daerah	1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	2	Program Pendidikan Menengah	1	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	1	Kepala Bidang SMA	1	Peningkatan Kurikulum SMA	Seksi Kurikulum SMA
		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	Seksi Sarana dan Prasarana SMA
		3	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia						3	Angka Putus Sekolah SMA			3	Peningkatan Peserta Didik SMA	Seksi Kesiswaan SMA
		4	Angka Kelulusan SMA												
		5	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA												
		6	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS												

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	2 Kepala Bidang SMK	1 Peningkatan Kurikulum SMK	Seksi Kurikulum SMK
							2 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah		2 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	Seksi Sarana dan Prasarana SMK
							3 Angka Putus Sekolah SMK		3 Peningkatan Peserta Didik SMK	Seksi Kesiswaan SMK
							4 Angka Kelulusan SMK			
							5 Nilai Rata-rata Ujian SMK			
							6 Persentase SMK yang menerapkan link and match			

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK	1 Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan	1 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
					2 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA		2 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK		Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK	
					3 Persentase guru SMA yang bersertifikat		3 Kelembagaan, Dekon dan Tugas Pembantuan		Kelembagaan, Dekon dan Tugas Pembantuan (tidak mendukung program)	
					4 Persentase guru SMK yang bersertifikat					
						4 Program Pendidikan Khusus	1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus	1 Bidang Pendidikan Khusus dan	1 Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus	Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							dan Layanan Khusus	Layanan Khusus	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus	Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
									3 Peningkatan Peserta Didik Pendidikan Khusus	Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus
						5 Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	1 Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran	1 Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Seksi Pemanfaatan
									2 Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Seksi Evaluasi
			2 Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan	1 Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah		1 Program Pelestarian Kebudayaan	1 Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten	1 Kepala Bidang Kebudayaan	1 Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian	Seksi Sejarah dan Tradisi

KELOMPOK I										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							2 Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/kelompok seni dan budaya)		2 Pengembangan Kesenian dan Bahasa Daerah	Seksi Kesenian dan Bahasa
							3 Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya		3 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Seksi Budaya dan Permuseuman
						2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 Kepala UPT Taman Budaya	1 Pelestarian Seni Budaya	Seksi Pelestarian Seni Budaya
							2 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya		2 Penyelenggaraan Seni Budaya	Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya
						3 Program Pengelolaan	1 Cakupan Pelayanan Museum	1 Kepala UPT Museum	1 Pengkajian dan Perawatan Museum	Seksi Pengkajian dan Perawatan

KELOMPOK I																	
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
						Kekayaan Budaya			Penyajian dan Layanan Edukasi Museum	Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi							
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyele nggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep
		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum												1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
															1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg/ Subag TU
															2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
															3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	

KELOMPOK I												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
									4 Peningkatan Kapasitas Aparatur			
									5 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah			
									6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan			
								2 Kepala Balai PPO	1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag TU		
									2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			
									3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran			
									4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah			
Terwujudnya Akses dan	1 IPM	1 Sekertaris Daerah	1 Terwujudnya	1 Indeks Pembangu		1 Program Peningkata	1 Cakupan Kelompok/	1 Kepala Bidang	1 Pembinaan Kepramukaan	Seksi Kepramukaan		

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	pemuda wirausahaan baru dan Olah Raga yang berprestasi		n Pemberdayaan Kepemudaan	Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	2	Penguatan Kelembagaan Pemuda	dan Kelembagaan Pemuda	
		3	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia						1	Pendidikan Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda		Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda
				2					Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda			
				2			Persentase Pemuda Wirausahaan Baru yang difasilitasi		1	Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Seksi Penghargaan, Fasilitas Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda	
									2	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda		

KELOMPOK I															
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
				2	Indeks Pembangunan Olahraga		1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	1	Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga	1	Kepala Bidang Pemberdayaan Olah Raga	1	Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus	Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus
									1	Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga			1	Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga	Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
									1	Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan			1	Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan	Seksi Sarana dan Prasarana Keolah Ragaan
							2	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	1	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional	1	Kepala Bidang Prestasi Olahraga	1	Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	Seksi Prestasi dan Penghargaan
									1	Peningkatan SDM Keolah Ragaan			1	Peningkatan SDM Keolah Ragaan	Seksi Sumber Daya Manusia Keolah Ragaan
									1	Pelayanan dan pengawsan organisasi keolah ragaan			1	Pelayanan dan pengawsan organisasi keolah ragaan	Seksi Kelembagaan Olahraga
							3	Program Pembinaan dan	1	Cakupan pembinaan olahraga	1	Kepala Balai PPO	1	Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar	Seksi Pembinaan dan Pelatihan

KELOMPOK I																			
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB									
						Pemasyarakatan Olah Raga			2	Pengelolaan Sekolah Khusus Olah Raga									
									1	Peningkatan sarana dan prasarana atlet PPLP	Seksi Sarana dan Prasarana								
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyele nggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep	
			2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		
			3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum												1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Subbag Keuangan
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor												Subag. Umum & Kepeg/ Subag TU			
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor															

KELOMPOK I															
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran					
									4	Peningkatan Kapasitas Aparatur					
									5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah					
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan					
			2	Adminis trasi kepend udukan yang tertib dan akunta bel	1	Capaian Tertib Administra si Kependud ukan	1	Program Administra si Kependudu kan dan Catatan Sipil	1	Rasio bayi berakte kelahiran	1	Kepala Bidang Kependudu kan dan Catatan Sipil	1	Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan	Seksi Pembinaan Kependuduka n
									2	Rasio Pasangan berakte nikah			2	Pembinaan administrasi sebagai data dan informasi pencatatan sipil	Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

KELOMPOK I																
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB						
							3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK		3 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
							4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk									
							5 Cakupan data dan informasi kependudukan									
Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan	IPM	1	Sekertaris Daerah	1	Kelembagaan PUG (Pengarurusan Gender) dan PUHA (Pengarurusan	1	Indeks pembangunan gender (IPG)	1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	1	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	1	Optimalisasi perencanaan dan penyediaan data gender dan anak	Seksi Pengarustamaan Gender
		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat							2	Cakupan Perencanaan Responsif Gender			2	Peningkatan kualitas hidup perempuan	Seksi Kualitas Hidup Perempuan

KELOMPOK I												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
berdaya saing		3	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	aan Hak Anak) yang berkualitas			3	Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		3	Peningkatan kualitas keluarga	Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
							4	Cakupan Kabupaten /Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender				
							5	Indek Ketahanan Keluarga				
							2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				

KELOMPOK I																				
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB		
												dan Anak	2	Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak			2	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak		Seksi Pemenuhan Hak Anak
													3	Rasio Perlindungan Khusus Anak			3	Perlindungan khusus terhadap anak		Seksi Perlindungan Khusus Anak
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	1	Sekretaris Daerah	1	Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	1	Laju pertumbuhan penduduk			1	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	1	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk		Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk
			2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat									2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)			2	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana		Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB

KELOMPOK I																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
		3	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia				3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana	Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana						
							4	Tingkat putus pakai kontrasepsi										
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyeenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
			2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat								2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan					
			3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum								3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor								1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg				

KELOMPOK I																	
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
melayani masyarakat									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor							
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran							
									4	Peningkatan Kapasitas Aparatur							
									5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah							
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan							
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas	1	Angka Kemiskinan	1	Sekretaris Daerah	1	Desa Tertinggal yang berkembang dan	1	Persentase Desa Mandiri	1	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang	1	Kepala Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa	Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	2 Daya beli / Inflasi	2	mandiri			t Desa		2 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	
		3							Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	1	Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
									2	Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa		
									3	Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						2 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik	1 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat	Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat
									2 Pembinaan, Fasilitasi dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan	Seksi Ketahanan Masyarakat
								2 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	1 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat	Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat
						3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	1 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	1 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan	Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
									2 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama	Seksi Pembinaan Kerjasama Desa

KELOMPOK I													
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB			
									Desa				
									2 Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Pembinaan dan Pengembangan partisipatif Pembangunan Desa	Seksi Perencanaan Partisipatif		
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompeten	1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Banten dan Direktur RSUD Malingping	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 SEKERTARIS DINAS dan RSUD Malingping	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP		
		2							Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3							Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum	3		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
										1		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB			
si serta melayani masyarakat									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran			
									4	Peningkatan Kapasitas Aparatur			
									5	Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah			
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan			
									2	Kepala Balai		1	Penyediaan Barang dan Jasa
												Pengadaan Sarana dan Prasarana	
			Pemeliharaan sarana prasana kantor										

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
									Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	
								3 Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Banten	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. Diklat dan PEP
							2 Peningkatan SDM RSUD Banten			
							3 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan			
							1 Penyusunan Laporan Penatausahaan pembedaharan, verifikasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Banten		Subag Pembendaharaan dan Verifikasi	

KELOMPOK I																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
									2	Penyusunan dokumen pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan								
									1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg/ Subag TU							
									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor								
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran								
									4	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah								
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	1	Sekretaris Daerah	1	Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah	1	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Kepala Dinas kesehatan	1	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	BID. KESEHATAN MASYARAKAT	1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	di Akses	2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)			2	Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani		1	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahrag
		3	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia						3	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat		2	Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				2	Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	1	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	1	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	BID. PELAYANAN KESEHATAN	1	Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

KELOMPOK I												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
							2	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)		2	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	
							3	Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat		1	Kerjasama Pelayanan Kesehatan	Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
							4	Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan		2	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	
										1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan / Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
									2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan / Pengadaan sarana dan prasarana kantor	
						2 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	1 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan	1 BID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
									2 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
									1 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
									2 Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa	

KELOMPOK I														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
									1	Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan			
						3	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	1	BID. SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN	1	Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2	Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan			
									3	Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan	Seksi Kefarmasian dan Pangan			
						4	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan	1	BALAI. LABKESDA	1	Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Seksi Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

KELOMPOK I																
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB						
						Daerah	yang di layani		2	Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah	Seksi Pengendalian Mutu					
						5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM	1	BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT	1	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja	Seksi Pelayanan Kesehatan		
										2	Peningkatan Pembinaan Promosi dan Surveilans Kesehatan Kerja	Seksi Promosi dan Surveilans Kesehatan Kerja				
			3	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1	Angka Harapan Hidup	Direktur RSUD Banten dan Direktur RSUD Malingping	1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	1	Bidang Pelayanan Medis	1	Operasional pelayanan	Seksi Pelayanan Operasional
										1	Pemantauan pelayanan	Seksi Pemantauan Pelayanan				
										2	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan	1	Bidang Keperawatan	1	Asuhan dan Etika Keperawatan	Seksi Asuhan, Etika dan Mutu keperawatan

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							an RSUD Banten		1 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan
							3 Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten	1 Bidang Logistik	1 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten	Seksi Pengelolaan Barang Medis
									1 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten	Seksi Pengelolaan Barang Non Medis
								2 Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	1 Rekam Medis	Seksi Rekam Medis dan Pelaporan
									1 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Seksi Sistem Manajemen Rumah Sakit
							4 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM	1 Bidang Keperawatan RSUD Malingping	1 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	Seksi Rawat Inap

KELOMPOK I																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
							Rumah Sakit Umum Malingping		2	Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus	Seksi Rawat Jalan dan Khusus							
							5 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping	1 Bidang Penunjang RSUD Malingping	1	Peningkatan Penunjang Medis RSUD Malingping	Seksi Penunjang Medis							
									2	Peningkatan penunjang Non medis RSUD Malingping	Seksi Penunjang Non Medis							
							6 Indeks kepuasan pelanggan	1 Bidang Pelayanan Medis RSUD Malingping	1	Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping	Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis							
									2	Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping	Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama							
Terwujudnya kelembagaan pemerintaha	1	Capaian Indeks Kepuasan	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyele	1	Capaian Laporan Kinerja	Kepala Dinas Sosial	1	Program Tata Kelola Pemerintah	1	Nilai IKM	1	Sekretaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
n daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Masyarakat	2	Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintah Provinsi Banten		an			2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		
		3	Staf Ahli Pemerintah, Politik dan Hukum						1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Subag Keuangan
		1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor						Subag. Umum & Kepeg			
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor									
		3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran									
		4	Peningkatan Kapasitas Aparatur									
		5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah									

KELOMPOK I																			
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB									
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan									
								2	Kepala Balai	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag TU							
									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor									
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran									
									4	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah									
Meningkatnya perekonomian banten melalui	1	TPT/Penganggaran	1	Sekretaris Daerah	1	Menurunnya PMKS	1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS			1	Program Rehabilitasi Sosial	1	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi	1	BID. Rehabilitasi Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	2 Angka Kemiskinan	2 Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		2 Index Gini			i Sosial		1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
		3 Staf Ahli Kemasayarakatan dan Sumber Daya Manusia							1 Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang
									2 Program Pemberdayaan Sosial	1 Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
									1	Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)			
									1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat			
						3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase Updating Data PMKS	1	BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
								2	Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial			1	Jaminan Sosial Keluarga	Seksi Jaminan Sosial Keluarga

KELOMPOK I

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							3 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan		1 Perlindungan Sosial Korban Bencana	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
						4 Program Penanganan Fakir Miskin	1 Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial	1 BID. Penangan Fakir Miskin	1 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
									1 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
									1 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

KELOMPOK I																									
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB							
											5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	1	Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	1	Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	1	Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	Seksi penerimaan dan penyaluran						
																	1	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S	Seksi pemulihan dan pengembangan						
																	6	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	1	Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial	1	Balai Perlindungan Sosial	1	Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial	Seksi penerimaan dan penyaluran
																							1	Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial	Seksi pelayanan dan perawatan
																							1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep
																	1	Capaian Indeks Kepuasan	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyele	1	Capaian Laporan Kinerja	Kepala Satpol PP

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
n daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Masyarakat	2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pemerintah Provinsi Banten		an			1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan	
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum						nggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg
										2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
										3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
										4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
										5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
										6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	

KELOMPOK I											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
									2 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Seksi Data dan Informasi
			2 Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1 Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah		1 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	1 BID. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan	
									1 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis	Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis	

KELOMPOK I														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
									1	Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten	Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian			
						2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Operasional dan Pengendalian
											1	Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Seksi Pengamanan dan Pengawasan	
											1	Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Seksi Kerjasama	

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						3 Program Perlindungan Masyarakat	1 Cakupan perlindungan masyarakat	1 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	1 Koordinasi, Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas	Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
						4 Program Penanganan Bencana Kebakaran	1 Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	1 BID. Pemadam Kebakaran	1 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten	Seksi Bina Aparatur
									1 Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Seksi Pencegahan Kebakaran
									1 Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi	Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
									1 Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran	Seksi Pasca Kebakaran

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Badan Penanggulangan Bencana	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep
			2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum												1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor												Subag. Umum & Kepeg		
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor														
			3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran														
			4	Peningkatan Kapasitas Aparatur														

KELOMPOK I																	
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
									5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah							
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan							
			2	Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1	Indeks Resiko Bencana	1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Optimalisasi Pencegahan Daerah Rawan Bencana	Seksi Pencegahan				
									1	Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Seksi Kesiapsiagaan					
									2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1	Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat	1	Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	Penanganan Kedaruratan Bencana	Seksi Penanganan Kedaruratan
									1	Peningkatan Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan		Seksi Pengadaan Logistik					

KELOMPOK I																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
							Bencana		2	PUSDALOPS Penanggulangan Bencana								
						3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1	Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	1	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana				
									1	Pemulihan Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Pasca Bencana			Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana					
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompeten	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelesaian Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Kesbangpol	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	SubBag Pep
		2	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat							2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan							
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset							Subag Keuangan
										1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor							Subag. Umum & Kepeg

KELOMPOK I											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
si serta melayani masyarakat									2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
									3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
									4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
									5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	
									1	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	
1	Angka Partisipasi Pilpres	1	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	1	Pembinaan Partai Politik	Subid. Fasilitasi Organisasi Politik					
			2	Angka Partisipasi Pilleg			2	Penyelenggaraa n Desk Pilkada			

KELOMPOK I										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			as Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI				3 Angka Partisipasi Pilgub		1 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Keompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya	Subid. Pembinaan Budaya Politik
							4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota			
						2 Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	1 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	1 Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	1 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam Kerangka Ketahanan Nasional	Subid Ketahanan Ekonomi
									1 Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Keompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional	Subid. Fasilitasi Organisasi Sosial

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						3 Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	1 Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
				2 Angka Kriminalitas		1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	1 Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah	1 Bidang Kewaspadaan Nasional	1 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	Subid. Kewaspadaan Dini & Penanganan Konflik
									2 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing	

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Sekretaris Dewan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Kabag TU	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bag Perencanaan	
			2									Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1	Verifikasi dan Pembukuan Keuangan	Sub Bag Verifikasi dan Pembukuan
			3									Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum	1	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Sub Bag. Perbendaharaan
			1									Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Sub Bag. Perlengkapan		
			2									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			
			1									Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Sub Bag. Rumah Tangga		
			1									Peningkatan Kapasitas Aparatur	Sub Bag TU dan Kepegawaian		
			2									Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah			

KELOMPOK I															
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
									3	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan					
									4	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan					
			2	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen	1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD	1	Bagian Hukum dan Persidangan	1	Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten	Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD
											1	Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum	Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD		
											1	Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten	Sub Bagian Persidangan, Rapat, dan Risalah		

**KELOMPOK I**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				RPJMD maupun Dokumen RKPD					1 Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten	Sub Bag Alat Kelengkapan DPRD
							2 Capaian % Pelayanan Keprotokol an, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD	1 Bagian Aspirasi dan Humas	1 Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi Banten	Sub Bagian Peliputan dan Protokol
									1 Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten	Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi
									1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat

Tabel A.4 Pembagian Indikator Kinerja Kelompok II

KELOMPOK II																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan,	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Biro Bina Perekonomian	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Bagian Sarana Perekonomian	1	Tata Usaha Bina Perekonomian	Kasubag Tata Usaha Bina Perekonomian
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian	2	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	1	Presentase Keselarasan Kebijakan pada	1	Bagian Sarana Perekonomian	1	Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan					

akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	efisien						Bidang Ekonomi		1	Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi		
												2	Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan	1	Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
														1	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
														1	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

												3	Bagian Produksi Daerah	1	Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		
														1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan		
														1	Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif,	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapai nya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data	1	Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Kasubag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan

efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarakat			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian	Efektif, dan efisien						2	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	1	Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data	1	Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan	Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaksanaan Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan													1	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan	Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan	
																2	Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
																		1	Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan	Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan

													1	Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah				
													1	Presentas e Kinerja Pengadaa n Barang/J asa	3	Bagian Administra si Pelaksanaa n Pembangu nan dan Pengadaa n Barang/Ja sa	1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
													1	Pengadaa n Barang dan Jasa			1	Pengendalian Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengadaa n Barang dan Jasa
													1	Pengendalian Barang dan Jasa			1	Pengendalian Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif,	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapai nya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel,	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah ah Provinsi Banten	Kepala Biro Bina Infrastruktur	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Bagian Perencanaa n Pelaksanaa n Pembangu nan dan Analisa Data	1	Tata Usaha Bina Infrastruktur	Kasubag Tata Usaha Bina Infrastruktur	

efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat			Efektif, dan efisien				2	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	1	Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur	1	Bagian Bina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
													1	Perumusan Kebijakan Pertanian	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian													
													1	Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
													2	Bagian Bina Infrastruktur ESDM	1	Perumusan Kebijakan ESDM	Sub Bagian Perumusan Kebijakan ESDM											
																								3	Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan	1	Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan

											Informasi, Persandian	1	Perumusan Kebijakan bidang komunikasi informasi, statistik dan persandian	Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kominfo, Statistik dan Persandian				
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan											3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan	
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor											Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU			
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor														
			3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran														
			4	Peningkatan Kapasitas Aparatur														

													5	Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah				
													6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan				
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	1	Jumlah Nilai Investasi	1	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliun)	1	Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD	1	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Seksi Promosi Penanaman Modal	
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian							1				Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan							1				Pembinaan BUMD dan Kemitraan	Seksi Pembinaan BUMD		
											2				Nilai Realisasi Investasi PMA	1	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Seksi Promosi Penanaman Modal
																1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi

						2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	1	Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	Pengembangan data potensi penanaman modal daerah	Seksi Potensi Investasi
												1	Perencanaan dan pengembangan Penanaman modal daerah	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi
												1	Pengembangan Sistem informasi penanaman modal daerah	Seksi Sistem Informasi
					2	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor						1	Pelayanan Perizinan	Seksi Pelayanan Perizinan
						1	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	1	Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan	1	Bidang Pelayanan	1	Pelayanan Non Perizinan	Seksi Pelayanan Non Perizinan
												1	Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan	Seksi Pelaporan dan Pengaduan
						2	Program Pengendalian Penanaman Modal	1	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi	1	Bidang Pengendalian Penanaman Modal	1	Pemantauan Realisasi Penanaman Modal	Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal

													1	Pembinaan Penanaman Modal	Seksi Pembinaan Penanaman Modal			
													1	Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan	Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTAR IS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		



											Teknologi dan Standarisasi Industri & Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				
												3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				
												4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah				
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap penganggura	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	1	LPE Sektor Perindustrian	1	Program Peningkatan Daya Saing Industri	1	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan	1	Bidang Perindustrian	1	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan	Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan
	2	Daya beli / Inflasi	2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian							2	Rasio Pertumbuhan industri kreatif			1	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

n dan kemiskinan	3	TPT	3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan										1	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	Seksi Sumberdaya Industri																
														2	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	1	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi	1	Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	1	Standarisasi dan sertifikasi Industri	Seksi Standardisasi dan Sertifikasi										
																1	Pengembangan dan Peningkatan Produk industri			Seksi Pengembangan jasa Teknik												
														2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	1	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting							1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah	1	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	1	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Seksi Stabilisasi Harga
																								2	capaian stabilitas harga barang pokok	2	Pengendalian Inflasi Daerah					

							3	Pertumbuhan Omset Pedagang			1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka							
							4	Neraca ketersediaan barang pokok			1	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan							
						3	LPE Sektor Perdagangan				1	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	1	Surplus Neraca Perdagangan	1	Bidang Perdagangan Luar Negeri	1	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah	Seksi Pengembangan Ekspor	
													1	Pengendalian Impor daerah	Seksi Pengendalian Impor					
													1	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri	Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri					
												2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	1	Indeks Tendensi Konsumen	1	Bidang Pengawasan	1	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri	Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri
														1	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Seksi Perlindungan Konsumen				

													1	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga	Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga									
													3	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi	1	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	1	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi	Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi			
																			1	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang	Seksi Pengujian Mutu Barang			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. PEP  Subag Keuangan  Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU



												4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah							
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1	1	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	1	BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	1	Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan	Seksi Pelatihan dan Pemagangan		
	2	TPT	2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian						1	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Seksi Bina Produktivitas								
	3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	1	Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan						Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan										
									2	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	Capaian Hubungan Industrial	1	BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2	Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial	Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial			
																		3	Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

										3	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja	1	BID. Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Peningkatan Pengawasan Norma Kerja	Seksi Norma Kerja
																2	Pengawasan Ketenagakerjaan	
																1	Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
																1	Peningkatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
										4	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Capaian Kesempatan Kerja	1	BID. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja	Seksi Pengembangan Pasar Kerja
																2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Seksi Penempatan Tenaga Kerja
																3	Penyiapan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi	Seksi Transmigrasi

								5	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	1	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja	1	BLKI	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten	Seksi Pelatihan		
														1	Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi Banten	Seksi Pengembangan dan Pemasaran		
										2	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja	1	BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja	1	Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi	Seksi Kelembagaan dan Akreditasi		
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompeten	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Pariwisata	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian										2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan			
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan										3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan		
														1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU		



pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	3	Daya beli / Inflasi	3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan								1	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Satuan Kelompok Wisata :	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata						
												2	Program Pemasaran Produk Pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata	1	Optimalisasi Promosi Pariwisata Provinsi Banten	Seksi Promosi Pariwisata
														2	Rata-Rata Lama Kunjungan			1	Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata
														3	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan			1	Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata Satuan Dokumen :	Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
												3	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif	1	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
																		1	Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

												1	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				
								4	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia		
													1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			
													1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi	Kepala Dinas Pertanian	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan										2	Penyediaan Data dan Informasi			

kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Perekonomian 3 Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	efisien	Banten				Pembangunan 3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 5 Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah	Subag Keuangan Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
---	--	---	---------	--------	--	--	--	--	---

													6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan							
													2	Kepala UPTD dan Balai	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Subbag TU				
													2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor							
													3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran							
													4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah							
Meningkatnya perekonomian banten	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi Sektor	1	Pertumbuhan Sektor Pertanian					1	Program Peningkatan Produksi	1	Capaian Produksi Tanaman	1	Bidang Tanaman Pangan	1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu	Seksi Produksi Serelia

melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	2	Daya beli / Inflasi	2	Asisten Pembangu nan Dan Perekonom ian	Pertania n yang optimal	n
			3	Staf Ahli Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan		

dan Produktivitas Tanaman Pangan	2	Capaian Produksi Tanaman Padi			Produk Serelia		
					1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi	Seksi Aneka Kacang dan Umbi
					1	Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan	Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan
4	Capaian Produksi Tanaman Kedelai	2	Balai Pelayanan Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura/	1	Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan	Seksi Tanaman Pangan	
				1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan		

							3	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Perlindungan Tanaman Pangan	Seksi Perlindungan Tanaman Pangan			
							4	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	1	Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan	Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan			
						2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	1	Capaian Produksi Tanaman Cabai	1	Bidang Hortikultura	1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
					2	Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah		1	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			Seksi Produksi Buah dan Florikultura		
									Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura			Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura		

								2	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultur a	1	Perlindungan Tanaman Hortikultura	Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan				
								3	Balai Pengawasa n dan Sertifikasi Benih	1	Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Hortikultura	Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Hortikultura dan Perkebunan				
								3	Program Peningkat an Produksi dan Produktivi tas Perkebun an	1	Peningkat an Produksi Komodita s Unggulan Perkebun an Kakao	1	Bidang Perkebuna n	1	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Seksi Produksi Perkebunan
										2	Capaian Produksi Tanaman	1	Pengembangan Komoditas Perkebunan	Seksi Pengembangan Perkebunan		

								Aren					
								3	Capaian Produksi Tanaman Kelapa		1	Pengembangan Aneka Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan
							2			Balai Pengawasa n dan Sertifikasi Benih	1	Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan	Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
							3			Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Horti kultura	1	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
							4			UPTD BBI TPH /BALAI PENGEMB ANGAN	1	Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Perkebunan	

									PERBENIHAN & PRODUKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2TPHBUUN)	1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan										
										4	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	1	Peningkatan Produksi Daging	1	Bidang Produksi Peternakan	1	Pengembangan Perbibitan Ternak	Seksi Perbibitan Ternak			
																	1	Pengembangan Pakan ternak	Seksi Pakan Ternak		
																	1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan		
																	2	Balai Pengembangan	1	Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakan	Seksi Mutu Pakan dan Hijauan Pakan

								Peternakan (Balai Pengujian mutu pakan dan perbibitan ternak)	ternak	ternak
									1 Perbibitan Ternak	Seksi Perbibitan Ternak
									2 Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu	
								5 Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	1 Persentase Sarana Produksi Pertanian	1 Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
									1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Seksi Pupuk, Pestisida, Alsintan
									1 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi	Seksi Lahan dan Irigasi
									1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani	Seksi Penyuluhan Pertanian
								6 Program Penanganan Kesehatan	1 Persentase Pengendalian	1 Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
									1 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Seksi Kesehatan Hewan

									n Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Masyarakat Veteriner	1	Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner				
												1	Pengawasan Obat dan Produk Hewan	Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan				
											2	Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner	1	Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Hewan			
												1	Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner				
Terwujudnya kelembagaan pemerintah	1	Capaian Indeks Kepuasan	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan	1	Capaian Laporan Kinerja	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	1	Program Tata Kelola	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP & Keuangan

n daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Masyarakat	2	Asisten Pembangu nan Dan Perekonom ian	ggaraan Pemerint ah yang Akuntab el,	Pemerint ah Provinsi Banten			Pemerinta han					2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3	Staf Ahli Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan	Efektif, dan efisien									3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
		1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor										1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor										2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
		3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran										3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
		4	Peningkatan Kapasitas Aparatur										4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	

													5	Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah			
													6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan			
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	1	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Ketersediaan pangan	1	Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	Seksi Ketersediaan Pangan
	2	Daya beli / Inflasi	2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											1	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	Seksi Sumberdaya Pangan
	3	Angka Kemiskinan	3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan											2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	
															1	Pembinaan dan Penanganan	Seksi Kerawanan

solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan											Kerawanan Pangan	Pangan
	2	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	1	Keterjangkauan/ akses pangan	1	Bidang Keterjangkauan Pangan	1	Pengelolaan Penataan Harga Pasar	Seksi Harga Pangan			
								1	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	Seksi Cadangan Pangan		
								1	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	Seksi Distribusi Pangan		
								2	Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA)			
	3	Program Perlindungan Konsumen Pangan	1	Pemanfaatan Pangan	1	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	Seksi Konsumsi Pangan			
								1	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan		

													1	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Seksi Pengawasan Pangan			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan												3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor												Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU		
			2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor														



												Jasa Perkantoran					
												4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah				
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	1	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	Persentase Produksi Perikanan	1	Bidang Perikanan Tangkap	1	Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Seksi Kepelabuhan Perikanan
	2	Daya beli / Inflasi	2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian									1	Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan									1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan		
													2	Balai Pelabuhan Perikanan	1	Tata Operasional BPPP Labuan	Seksi Tata Operasional BPPP Labuan

terhadap pengangguran dan kemiskinan								Pantai Labuan	1	Pengembangan Usaha Pelabuhan	Seksi Pengembangan BPPP Labuan
	2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Luas Laut Yang Terawasi	1	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan		
							1	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan		
							1	Penanganan Pelanggaran	Seksi Penanganan Pelanggaran		
	3	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	1	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI	1	Bidang Peningkatan Daya Saing	1	Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan	Seksi Investasi dan Promosi		
							1	Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk	Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi		



									4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	1	Bidang Pengolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil	1	Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	
															1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
															1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
													2	Balai Budidaya Ikan Air Pantai	1	Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau	Seksi Produksi	
															1	Pelayanan Teknis BBIP	Seksi Pelayanan Teknis BBIP	
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan	1	Capaian Indeks Kepuasan	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapai nya Penyelen	1	Capaian Laporan Kinerja	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan	1	Program Tata Kelola	1	Nilai IKM	1	SEKERTAR IS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subbag. PEP

n daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Masyarakat	2	Asisten Pembangu nan Dan Perekonom ian	ggaraan Pemerint ahan yang Akuntab el, Efektif, dan efisien	Pemerint ah Provinsi Banten	Kehutanan	Pemerinta han					2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3	Staf Ahli Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan									3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
		1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor									Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU		
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor											
		3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran											
		4	Peningkatan Kapasitas Aparatur											



Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Lingkungan Hidup yang berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	1	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	1	Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian										1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan										1	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup		
										2	Peningkatan Peran serta masyarakat	1	Bidang Penataan dan Peningkatan	1	UPT Lab Lingkungan	1	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Seksi Mutu
															1	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Seksi Teknis	
															1	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan	Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak	

								at dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	n Kapasitas	hidup	Lingkungan	
										1 Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum	
										1 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Seksi Peningkatan Kapasitas	
				2	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1	Rasio Cakupan Tutupan Hutan					
				1	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1	Luas Lahan kritis yang terhabilitasi	1	Bidang Pengelolaa n DAS, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberday	1	Pengelolaan DA S dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan
										1 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	



										Perbenihan Tanaman Kehutanan	1	Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	Proteksi tanaman dan pengawasan peredaran benih		
										Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	1	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1	Perencanaan dan penatagunaan hutan	Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan
									1				Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	
									1				Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	
											2	Balai Pengelolaan Tahura	1	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

													1	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian												1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan												1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
																2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
3	Penyediaan Barang dan Jasa																	

masyarkat												Perkantoran			
												4 Peningkatan Kapasitas Aparatur			
												5 Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah			
												6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan			
		2	Perencanaan dan Penganggaran Pembanguan Daerah yang berkualitas	1	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan		1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1	Persentase dokumen perencanaan RPJPD RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan	1	Bidang P4	1	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

					Daerah			n dengan PERDA						
								2	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			2	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
								3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD			3	Kerjasama Pendanaan Pembangunan	Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan



										Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan								
										1	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif						
										3	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	1	Bidang Sosial dan Pemerintahan	1	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
												2	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan					





				3	Penelitian dan pengembangan yang berkualitas				1	Program Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	1	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan	
															1	Tersusunnya Dokumen hasil Pengembangan Inovasi Kebijakan Strategis Daerah	Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	
				4	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas				1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1	Tersedianya Data Dan Informasi Pembangunan			1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Sub Bidang Data dan Informasi	
Terwujudnya kelembagaan	1	Capaian Indeks	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya	1	Capaian Laporan	Kepala Badan Pendapatan	1	Program Tata	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan	Subag. PEP

<p>pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</p>	<p>Kepuasan Masyarakat</p>		<p>Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</p>	<p>Kinerja Pemerintah Provinsi Banten</p>	<p>Daerah</p>	<p>Kelola Pemerintahan</p>						Pelaporan		
		2									Asisten Pembangu nan Dan Perekonom ian	2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3									Staf Ahli Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan	3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
												1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	<p>Kasubag. Umum &amp; Kepeg/ Subag TU</p>
												2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
												3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
		4	Peningkatan Kapasitas											



												Keluar Daerah	
				2	Pendapatan Daerah yang Optimal	1	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah						
				1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1	Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan	1	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1	Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi	
										1	Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	
										1	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	



										Daerah									
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
			2	Asisten Pembangu nan Dan Perekonom ian													2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangu nan, Ekonomi dan Keuangan													3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
																	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor																



				2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional	1	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah				1	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1	Bidang Akuntansi	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sub Bidang Akuntansi I
																	1	Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik dan Laporan Keuangan	Sub Bidang Akuntansi II

												2	Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten							
												1	Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD	Sub Bidang Pembinaan Akuntansi						
												2	Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi							
												2	Program Peningkat	1	Persentase	1	Bidang Perbendah	1	Penatausahaan Realisasi	Sub Bidang Perbendaharaa



													1	Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah	Sub Bidang Bina Aset Milik Daerah			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan												3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
																1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor															

												3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
												4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
												5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
												6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	
									2	Kepala UPTD dan Balai	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Subag TU	
											2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		
											3	Penyediaan Barang dan		

												Jasa Perkantoran					
												4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah				
Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan	1	Capaian kinerja infrastruktur daerah	1	Sekretaris Daerah	1	Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	1	Tingkat Kemantapan Jalan	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	1	BID. BINA MARGA	1	Pembangunan Jalan Wilayah Utara	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian									2	Pembangunan Jalan Wilayah Selatan			
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan									2	BALAI JALAN & JEMBATAN	1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
												1	Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan	Seksi Bahan dan Peralatan			

perekonomian daerah								2	Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis	1	1	1	1	1	BID. BINA MARGA	1	Pengadaan Lahan Kebinamargaan	Seksi Penatagunaan Preservasi
															2	Preservasi Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan	
																1	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Seksi Perencanaan dan Pengawasan
																2	Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	Teknis Jalan dan Jembatan
																3	Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang PUPR	
								3	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi	1	1	1	1	1	1	1	Pembangunan Jembatan	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan



										1	Pengawasan Jasa Konstruksi	Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi								
				2	Penangg ulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersed iaan Air Baku	1	Persenta se pemulih an dan pencegah an banjir			1	Program Pembang unan Sumberda ya Air	1	Cakupan pemulih an dan pencegah an banjir	1	Bidang Pengelolaa n Jaringan Sumber Daya Air	1	Perencanaan Teknis Bidang PJSA	Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA		
													2	Cakupan Pemulih an Pencegah an Abrasi			2	Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air		
																		1	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	Seksi Pelaksanaan PJSA
																		1	Penatagunaan Sumber Daya Air	Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air
						2	Pemenuh an							1	Luas Layanan	1	BALAI PSDA	1	Pengelolaan Sistem	Seksi Pemanfaatan



																		Air				
				3	Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	1	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang							1	Program Penataan Ruang	1	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi	1	BID. TATA RUANG	1	Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang	Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
																				1	Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang
																				1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Program Tata Kelola Pemerintah	1	Nilai IKM	1	Sekretaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan

yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	t	2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian	Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ah Provinsi Banten	Permukiman	han					2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan									3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
		1										1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg
		2										2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
		3										3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
		4										4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
		5										5	Rapat Koordinasi	



Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	1	Capaian kinerja infrastruktur daerah	1	Sekretaris Daerah	1	Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan	1	Luasan Kawasan Kumuh	1	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	1	BID. KAWASAN PERMUKIMAN	1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian			1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh			Seksi Penanganan Kawasan Permukiman						
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan			1	Penatagunaan Kawasan Permukiman			Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman						
			2	Persentase Rumah Layak Huni			1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani			1	BID. PERUMAHAN			1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

												1	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan							
												1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Seksi Penatagunaan Perumahan dan							
												2	Penyelenggaraa n Pengadaan Lahan	Pertanahan							
				3	cakupan pelayanan pengelolaan sampah							1	Program Keciptakaan	1	Cakupan Pelayanan Air Minum	1	BID. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Seksi PLP dan Air Minum	
																		2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		
																			3	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	

											1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman												
											2	Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	1	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik											
											1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1	BID. KAWASAN PERMUKI MAN	1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Seksi Penataan Bangunan						
																		2	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi						
																			2	Peningkatan kualitas KP3B	1	UPT KP3B	1	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	Seksi Sarana dan Prasarana
																			1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	1		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	Seksi Pemeliharaan dan

															Kebersihan			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian												2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan												3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan
																1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor															

														3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		
														4	Peningkatan Kapasitas Aparatur		
														5	Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah		
														6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan	1	TPT	1	Sekretaris Daerah	1	Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah,	1	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi,	1	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi	1	Bidang Geologi dan Air Tanah	1	Pengusahaan Air Tanah	Seksi Pengusahaan Air Tanah
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											1	Pengendalian geologi dan air tanah	Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah

energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan		3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Mineral dan Batubara yang efektif				Air Tanah, Mineral dan Batubara	perijinan	2	Bidang Mineral dan Batubara	1	Eksplorasi mineral dan batubara	Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara
												1	Operasi Produksi Mineral dan Batubara	Seksi Operasi Produksi Mineral dan Batubara
												1	Reklamasi dan pasca tambang	Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang
												1	Pengembangan Geologi dan Air Tanah	Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah
														1
												2	Bidang Mineral dan Batubara	1

										1	Operasi produksi mineral dan batubara	Seksi Operasi Produksi Mineral Dan Batubara
										1	Reklamasi dan pasca tambang	Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang
		2	Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	1	Rasio elektrifikasi					1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan
										1	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
										1	Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
										1	Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi	Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi

								2	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	1	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar	1	Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan	1	Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan		
														1	Pengusahaan ketenagalistrikan	Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan		
														1	Pengendalian ketenagalistrikan	Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan		
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Dinas Perhubungan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	SEKERTARIS DINAS	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi											3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan	

n sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat			dan Keuangan									1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
												2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
												3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
												4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
												5	Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah	
												6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	

Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	1	Capaian kinerja infrastruktur daerah	1	Sekretaris Daerah	1	Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	1	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	1	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan	1	Bidang Pengembangan Transportasi	1	Pengembangan Prasarana Transportasi	Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian							1	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan			Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan							1	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi			Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi		
									2	Program Pengendalian dan	1	Persentase pengatur	1	Bidang Lalulintas	1	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Seksi Manajemen dan Rekayasa







Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan																	
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian													2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan																		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan													3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset																		
																																1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Subag. Umum & Kepeg		
																																2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
																																3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

										4	Peningkatan Kapasitas Aparatur							
										5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah							
										6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan							
										2	Pelayanan Pemerintah Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informas	1	Persentase Pelayanan e-Governm ent Pemerintah ah Provinsi Banten					
										1	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunika	1	Persentase ketersediaan perangkat TI	1	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas i	1	Pengembangan Sarana dan prasarana telematika	Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
																1	Pengelolaan Teknologi Informasi	Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi
																1	Pendayagunaan Telematika	Seksi Pendayagunaan Telematika





Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	1	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian													2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan													3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
			1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor													Subag. Umum & Kepeg		
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor																		
			3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran															

												4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
												5	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
												6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	
									2	Kepala Balai		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Subag TU
												2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
												3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	

											4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah							
											1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Balatkop)	Seksi Evaluasi dan Pelaporan						
Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan	1	LPE	1	Sekretaris Daerah	1	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	1	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Omset Koperasi	1	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1	Capaian Koperasi Aktif	1	BID Kelembagaan dan Pengawasan	1	Kelembagaan dan Perizinan	Seksi Kelembagaan dan Perizinan		
			2	Asisten Pembangunan Dan Perekonomian											1	Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan		
			3	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan											1	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan	Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan		
											2	Program Peningkat	1	Persentase	1	BID Pemberday	1	Bina Usaha Koperasi	Seksi Bina Usaha



				yang berdaya	Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil		ngan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain	aan Usaha Kecil	1	Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil
										1	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil

Tabel A.5 Pembagian Indikator Kinerja Kelompok III

KELOMPOK III

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompete	1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Sekertaris Daerah	1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Biro Umum	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 Bagian Tata Usaha	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten	Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan
		2 Asisten Administrasi Umum							2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum	
		3 Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							3 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda	
									1 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten	Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
nsi serta melayani masyarakat									1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Umum	Sub Bagian Sarana dan Prasarana
									2 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda	
									3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda	
									4 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
						2 Program Pelayanan Umum	1 Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik	1 Bagian Perlengkapan	1 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Analisa Kebutuhan
									1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Sub Bagian Pengadaan
									1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi
								2 Distribusi Sarana dan Prasarana		
								2 Bagian Keuangan Setda	1 Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda	Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas

KELOMPOK III																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
									2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur								
									1	Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum	Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi							
									1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi							
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekretaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah	Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Bagian Rumah Tangga	1	Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Sub Bagian TU Biro

KELOMPOK III														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
an daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		2	Asisten Administrasi Umum	han yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Provinsi Banten	2	Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	1	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	1	Bagian Rumah Tangga	1	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	Sub Bagian Urusan Dalam
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum									1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Pemeliharaan
		2	Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan					2	Bagian TU Pimpinan	1	Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur	Sub Bagian TU Gubernur dan Wakil Gubernur		
										1	Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah	Sub Bagian TU Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah		
1	Penyelenggaraa n Dinas Pimpinan	1	Penyelenggaraa n Dinas Pimpinan	Sub Bagian Keuangan Pimpinan										

KELOMPOK III														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
							3	Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan	3	Bagian Protokol	1	Tata Acara Pimpinan	Sub Bagian Tata Acara	
											1	Pelayanan Tamu Pimpinan	Sub Bagian Pelayanan Tamu	
											1	Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi	
						3	Program Pelayanan Umum	1	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam	1	Bagian Perlengkapan	1	Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Analisa Kebutuhan
											1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Sub Bagian Pengadaan	
											1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi	

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							kondisi baik		2 Distribusi Sarana dan Prasarana	
								2 Bagian Keuangan Setda	1 Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda	Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas
									2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur	
									1 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum	Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

KELOMPOK III																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB								
									1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi							
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Biro Organisasi	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1	Tata Usaha Biro Organisasi	Sub Bagian TU Biro
										2	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B	1	Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1	Tatalaksana Organisasi	Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
										3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum	1	Kebijakan Pelayanan Publik	Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik				
										2	Bagian Kelembagaan	1	Kelembagaan dan Perangkat Daerah	Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah				

KELOMPOK III													
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB			
daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat									1	Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota	Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota		
									3	Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	1	Analisa Formasi Jabatan	Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
											2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
									1	Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda	Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Biro		

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
									1 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten	Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,	1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Sekertaris Daerah	1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 Sekertaris	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
		2 Asisten Administrasi Umum							2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3 Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
									1 Pengadaan Sarana Prasarana	Subag. Umum & Kepeg

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat									Kantor	
									2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
									3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
									4 Peningkatan Kapasitas Aparatur	
									5 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
									6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan	

KELOMPOK III																	
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
									Perpustakaan								
			2	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN			1	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	1	Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	1	Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai	1	Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan	Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan
											1	Kepangkatan dan Penggajian	Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian				
											1	Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun	Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun				

KELOMPOK III														
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB				
							1	Prosentase akurasi data kepegawaian	2	Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian	1	Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	
							2	Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai			1	Data dan Informasi Kepegawaian	Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian	
											1	Disiplin Pegawai	Sub Bidang Disiplin Pegawai	
						3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan	1	Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur	1	Pengembangan Jabatan Fungsional	Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional
											1	Pengangkatan Jabatan Tinggi dan	Sub Bidang Pengangkatan Jabatan Tinggi	

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							kebutuhan dan kompetensinya			Administrasi dan Administras
									1 Pengembangan Kompetensi Pegawai	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan,	1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Sekertaris Daerah	1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 Sekertaris	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP dan Keuangan
		2 Asisten Administrasi Umum							2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3 Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
									1 Pengadaan Sarana	Subag. Umum & Kepeg

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat									Prasarana Kantor	
									2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
									3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	
									4 Peningkatan Kapasitas Aparatur	
									5 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	
									6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan	

KELOMPOK III																	
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
									Perpustakaan								
			2	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	1	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN			1	Program Pengembangan SDM Aparatur	1	Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik	1	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	1	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Prajabatan
											1	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	1	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan		
											1	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	1	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan		

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							1 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik	1 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	1 Pengembangan Kompetensi Fungsional	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
									1 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
									1 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif
						2 Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	1 Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara	1 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat	1 Pengendalian Mutu Diklat	Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat

KELOMPOK III																				
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB		
													diklat							
													2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur				1 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama		Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama	
																	1 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran		Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran	
Terwujudnya kelembagaan	1	Capaian Indeks Kepuasan	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyeleng	1	Capaian Laporan Kinerja	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip	1	Program Tata Kelola	1	Nilai IKM	1	Sekertaris	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Subag. PEP dan Keuangan	

KELOMPOK III												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
<p>n pemerintah an daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani</p>	Masyarakat	2	Asisten Administrasi Umum	<p>garaan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</p>	Pemerintah Provinsi Banten	Daerah	Pemerintahan			2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Subag. Umum & Kepeg
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	
										1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	
										2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
										3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	

KELOMPOK III												
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB		
masyarakat									4 Peningkatan Kapasitas Aparatur			
									5 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah			
									6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan			
Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju	1 IPM	1 Sekertaris Daerah	1 Minat Baca Masyarakat yang meningkat	1 Persentase peningkatan minat baca masyarakat		1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembina	1 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum	1 Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustaka	1 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan		

KELOMPOK III																		
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB							
kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdayasaing		2	Asisten Administrasi Umum		at		an Perpustakaan	dan perpustakaan khusus	an dan Kearsipan	1	Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Seksi Pembudayaan Pembudayaan Kegemaran Membaca						
		3	Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum							1	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Seksi Pembinaan Kearsipan						
										2	Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	1	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	1	Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan	1	Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
																1	Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis	Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia

KELOMPOK III															
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB					
									Teknologi dan Informatika						
									1 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan					
			2	Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	1	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan Kearsipan	1	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah	1	Bidang Pengelolaan Arsip	1	Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis	Seksi Akuisisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi
									2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis	2	Pengelolaan Arsip Dinamis	Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis		

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
							Daerah			
							3 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar		1 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip	Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif,	1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Sekertaris Daerah	1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Inspektur	1 Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	1 SEKERTARIS DINAS	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Subag. PEP
		2 Asisten Administrasi Umum							2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	
		3 Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan							3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Subag Keuangan

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Hukum							1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Kasubag. Umum & Kepeg/ Subag TU
								2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		
								3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		
								4 Peningkatan Kapasitas Aparatur		
								5 Rapat Koordinasi Ke dalam dan Keluar Daerah		

KELOMPOK III											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
									6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	
			2	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	1	Capaian Maturitas SPIP					
						1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	IRBANWIL 1 S.D 4		
							1	Capaian OPINI Laporan Keuangan		1	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan
							2	Capaian Leveling Maturitas SPIP		2	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
							3	Indeks Integritas		3	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan

KELOMPOK III										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
									Daerah	
							4	Capaian Nilai Sakip	4	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan
									5	Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten
									6	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten

KELOMPOK III																				
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB		INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT		PENANGGUNG JAWAB		
																	7	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian		
																	8	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah		
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang	1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Sekertaris Daerah	1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	1	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Kepala Kantor Penghubung	1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	Nilai IKM	1	Kepala Kantor Penghubung	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Kasubag Tata Usaha

KELOMPOK III											
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEGIATAN/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	
berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		3	Staf Ahli Pemerintah, Politik dan Hukum	, Efektif, dan efisien					3		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
									4		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
									5		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
									6		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
									7		Peningkatan Kapasitas Aparatur
8	Rapat Koordinasi										



B. TATA CARA PELAPORAN INDIKATOR KINERJA

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Lingkup Provinsi

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi menggunakan Formulir

B.1, sebagai berikut:

**Formulir B.1  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**

Provinsi : .....  
 Perangkat Daerah : .....  
 Periode Renja Perangkat Daerah : .....  
 Periode RKA Perangkat Daerah : .....

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)		Rencana Tahun ..... (Tahun Rencana) (4)						Prakiraan Maju Rencana Tahun ..... (7)				Kesesuaian (9)		Evaluasi (11)	Tindak Lanjut (12)	Hasil Tindak Lanjut (13)
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana		Ya	Tidak			
				Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA			

....., tanggal .....  
**KEPALA PERANGKAT DAERAH**  
 .....  
 PROVINSI .....

( )

## Petunjuk Pengisian Formulir B.2:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang urusan pemerintahan daerah serta uraian program dan kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi dengan besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah provinsi dan RKA-Perangkat Daerah provinsi;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah provinsi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom(5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah provinsi ?

- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi?
- Apakah pagu anggaran dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah provinsi ?
- Apakah prakiraan maju provinsi anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi ?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah provinsi ?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan; Kolom (12) diisi dengan tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan Kolom (13) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah provinsi mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA- Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.
3. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.
4. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah provinsi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dan memberikan penilaian sebagai mana bobot penilaian pada tabel B.2 dibawah ini :

Tabel B.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
6. Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti diterima.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010